

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Koneksi politik merupakan fenomena umum di seluruh dunia, khususnya dalam konteks perekonomian yang sedang berkembang dan berada pada masa revolusi (Adhikari, Derashid, & Zhang, 2006). Hal tersebut telah menjadi sebuah perdebatan pada waktu yang lama dalam berbagai literatur. Menurut Faccio (2006), yang telah melakukan penelitian pada lebih dari 20.000 perusahaan yang terletak di berbagai negara di dunia, mengemukakan bahwa pada perusahaan yang terkoneksi secara politik terdapat stakeholder yang memiliki jabatan penting di beberapa lembaga negara atau jabatan yang mendekati pemimpin perusahaan tidak memiliki dampak signifikan dalam konteks harga, meskipun secara politik memiliki pengaruh politik luas. Selain itu, beliau juga memiliki pandangan bahwa motif suatu perusahaan untuk memiliki koneksi politik dikarenakan perusahaan berhadapan mendapatkan *privilege* dari pihak yang berwenang.

Suatu perusahaan bisa dianggap sebagai perusahaan yang terkoneksi secara politik apabila salah satu *stakeholder* perusahaan yang memiliki jabatan penting di perusahaan seperti dewan komisaris dan dewan direksi dari jajaran menteri, parlemen, dan orang yang memiliki peran di dunia politik (Faccio, et al. 2006). Koneksi politik tersebut, umumnya digunakan pihak-pihak terkait untuk mengambil keuntungan dari segi materi maupun non-materi.

Indonesia sebagai bagian dari negara yang masih berkembang sejak era orde baru memiliki fenomena yang serupa, yaitu koneksi politik dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat. Penelitian Fishman (2001) menemukan bahwa pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru), koneksi politik pada kegiatan ekonomi merupakan salah satu keputusan yang penting sifatnya, karena dinilai dapat menunjang nilai perusahaan. Pada suatu waktu dalam era orde baru, pihak pemerintah memiliki kecenderungan melibatkan beberapa kerabatnya ke dalam ruang lingkup bisnis. Fenomena tersebut menjadi salah satu faktor pendukung atas berkembangnya suatu bisnis pada era tersebut.

Setiap perusahaan memiliki nilai perusahaan yang berbeda, bergantung pada performa perusahaan tersebut. Tingkat kenaikan dan penurunan nilai perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap harga saham perusahaan. Kesejahteraan para *shareholder* tercermin pada harga saham perusahaan. Dengan demikian, wajar apabila para *shareholder* memiliki minat yang lebih tinggi dengan perusahaan yang nilai perusahaannya tinggi atau diprediksi naik ketimbang perusahaan yang memiliki nilai perusahaan rendah. Citra perusahaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sedangkan citra perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh nilai perusahaan. Jadi, pemegang saham dan perusahaan memiliki ketertarikan yang sama terhadap nilai perusahaan.

Nilai perusahaan (*firm value*) pada umumnya merupakan representasi dari harga saham perusahaan tersebut. Salah satu penentu dari kesejahteraan pemegang saham (*shareholder*) sebuah perusahaan ditentukan oleh baik-buruknya nilai perusahaan. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur yang dapat dilihat pada tingkat harga saham perusahaan yang terdapat di pasar modal yang telah memenuhi syarat efisiensi secara informasional. Kinerja perusahaan dalam situasi normal berbanding positif dengan nilai perusahaan.

Hukum permintaan dan penawaran berlaku pada dunia pasar modal. Kenaikan dan penurunan harga saham dapat dipengaruhi oleh *supply and demand* pada pasar modal. Harga saham umumnya merepresentasikan harga wajar nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin tinggi pula harga saham perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menimbulkan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) memiliki beberapa opsi untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai perusahaan melalui performa perusahaannya, salah satunya membuat koneksi politik. Perusahaan yang terkoneksi secara politik merupakan perusahaan yang mempunyai relasi atau kepentingan tertentu kepada pemerintah sebagai pihak yang berwenang. Relasi tersebut umumnya mendatangkan keuntungan berupa perlakuan khusus dari pemerintah kepada perusahaan yang terkoneksi politik.

Koneksi politik yang dibangun pada perusahaan dapat mendapatkan keuntungan non-material tertentu, seperti pinjaman bank, keringanan pajak, subsidi pemerintah, kontrak kerja secara langsung, bantuan regulasi, dan lain sebagainya. Perspektif lain menunjukkan bahwa koneksi politik bisa menjadi sebuah sarana bagi politisi untuk memeras uang perusahaan yang dapat berakibat terhambatnya pertumbuhan nilai perusahaan. Fenomena tersebut dianggap wajar karena setiap keputusan dapat memiliki keuntungan dan risiko bagi masing-masing pihak.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur besar-kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi salah satu indikator atas kemampuan perusahaan untuk menanggung berbagai risiko yang mungkin bisa terjadi di masa depan.

Hasil penelitian Prasetyorini (2013), menunjukkan bahwa laju ukuran perusahaan berbanding lurus terhadap nilai perusahaan meskipun tidak berpengaruh secara signifikan. Peneliti tersebut menyatakan bahwa pada umumnya perusahaan menggunakan dana internal perusahaan ketimbang menggunakan hutang.

*Leverage* adalah salah satu indikator yang biasa dipakai oleh *stakeholder* untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan dana yang berasal dari hutang perusahaan. Konsep *leverage* penting bagi investor dalam menentukan keputusan investasi terhadap perusahaan. Pada umumnya risiko merupakan hal yang dihindari oleh investor. Bhekti (2010) menunjukkan hasil yang signifikan terkait ukuran perusahaan dan tidak signifikan terkait *leverage* terhadap nilai perusahaan.

Setiap visi pemerintah akan dicapai dengan berbagai kebijakan dirancang dan diambil pemerintah. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui beberapa program, salah satunya pembangunan infrastruktur, peningkatan performa sarana dan prasarana penunjang mobilitas, dan lain sebagainya baik dari sektor Sumber Daya Manusia maupun secara materi. Perusahaan yang memiliki peran penggerak rantai perekonomian negara menjadi salah satu pihak yang menerima dampak kebijakan pemerintah. Banyak komponen di dalam perusahaan yang terkena dampak kebijakan yang diterapkan pemerintah, seperti fluktuasi biaya, pajak, tingkat penjualan dan pendapatan, dan lain sebagainya.

Menurut Adwani (2015), dalam penelitiannya terkait tindak pidana korupsi presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua memiliki citra yang cukup baik dalam penanganan kasus korupsi, meskipun dengan kendala terjadinya konflik internal KPK dan banyaknya kader partai demokrat yang terjerat kasus korupsi. Presiden susilo bambang yudhoyono secara umum memiliki kebijakan yang berfokus pada pengamanan APBN, meningkatkan peluang untuk meningkatkan penerimaan negara, penghematan energi melalui iklan masyarakat, penggunaan gas domestik untuk mengontrol konsumsi BBM, dan menambah regulasi yang bersifat kondusif bagi pengembangan investasi dalam negeri. Inisiatif tersebut berasal dari gejolak harga minyak dunia.

Berdasarkan publikasi dari [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id) pada tanggal 18 September 2015 terkait kebijakan ekonomi, presiden Joko Widodo melakukan langkah-langkah yang mendorong sektor perekonomian melalui perombakan 98 peraturan untuk menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi serta memangkas peraturan yang menghambat daya saing industri nasional sejak tahun 2015. Selain itu, beliau juga mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang transportasi untuk menunjang distribusi komoditas serta meningkatkan investasi di sektor properti dengan menerbitkan peraturan yang menunjang sektor yang berkaitan.

Pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa pejabat dari berbagai lapisan dapat diungkap kasus korupsinya. Sedangkan pada era pemerintahan presiden Joko Widodo pemerintah menggalakan pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem, meskipun pada tindakan represif masih lemah.

Penulis mengamati visi yang diterapkan pada 2 era pemerintahan dengan dua latar belakang yang berbeda. Periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki fokus pada subsidi energi, yang menjadi salah satu penunjang perekonomian berbagai sektor. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada biaya produksi, biaya pengiriman, biaya hidup masyarakat dan sebagainya. Sedangkan di era pemerintahan Joko Widodo, pemerintah fokus terhadap pemerataan ekonomi yang dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang, optimalisasi berbagai terminal

untuk berbagai kebutuhan logistik, pengembangan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Terdapat perbedaan yang cukup jelas antara 2 fokus kebijakan pemerintah tersebut.

Indonesia sebagai negara yang masuk dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki jumlah kasus nepotisme yang tinggi. Adanya pendapat tersebut, memungkinkan politisi yang terlibat dalam perusahaan tentunya mengambil langkah yang menguntungkan pihaknya, bahkan pihaknya dan perusahaan juga.

Indonesia memiliki *Corruption Preception Index* (CPI) sebesar 3,7 pada tahun 2017 yang membuat Indonesia masuk dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi ([www.transparency.org/country/IDN](http://www.transparency.org/country/IDN), diakses 12 November 2018). Fenomena koneksi politik sering terjadi di mayoritas negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik dalam mempelajari hal tersebut.

Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan fenomena yang banyak terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut hampir bisa dikatakan budaya warisan. Fenomena tersebut merupakan budaya warisan orde baru, yaitu pada era pemerintahan presiden Soeharto sesuai pernyataan yang diungkapkan Fishman (2001). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Goldman *et al.* (2009) meneliti terkait reaksi atas hasil kemenangan partai yang mengikuti pemilihan umum yang diselenggarakan Amerika Serikat pada Tahun 2000. Beliau menyatakan nilai perusahaan pada perusahaan terkoneksi secara politik dengan partai yang memperoleh kemenangan dalam pemilu mengalami kenaikan harga saham, begitu pula sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wang, *et al.* (2018) menemukan kesimpulan terjadi penurunan ekuitas sebesar 2% ketika pejabat politik yang memiliki koneksi terhadap perusahaan diberhentikan. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk melindungi nilai perusahaan dari guncangan politik dari luar. Pemerintah melakukan kampanye tersebut juga untuk melindungi perusahaan yang tidak terkait dengan politik, tidak hanya sekedar propaganda belaka. Hal ini juga menjadi salah satu bukti bahwa di China, koneksi politik memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ganguli (2018) menunjukkan perusahaan memiliki keterkaitan dengan pejabat partai politik yang mengalami kemenangan dalam pemilu meningkat harga sahamnya, sedangkan harga saham perusahaan yang terkait dengan partai yang berlawanan mengalami kondisi yang sebaliknya. Fenomena yang terjadi di India memperkuat pendapat bahwa koneksi politik mempengaruhi fluktuasi harga saham.

Penelitian tentang koneksi politik dengan nilai perusahaan belum banyak dilakukan. Apabila kita tinjau dari beberapa penelitian sebelumnya, koneksi politik memiliki peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Bahkan pemerintah turut andil dalam memperhatikan fenomena ini. Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang memiliki tingkat cukup korupsi tinggi, masih sering terjadi praktik KKN sampai sekarang. Namun, menurut data dari Transparency International sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 Indonesia mengalami penurunan tingkat CPI (Corruption Preception Index). Meskipun mengalami penurunan sampai tahun 2017, Indonesia tetap masuk dalam kategori negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Fenomena tersebut menjadi salah satu faktor penarik penulis untuk melakukan penelitian dengan topik terkait. Banyaknya agenda proyek pembangunan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo membuat kalangan politisi dan perusahaan bergerak di masing-masing lini kuasanya untuk mencapai tujuan mereka. Pada penelitian yang dilakukan pada kali ini, peneliti menggunakan koneksi politik, ukuran, *leverage* sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Latar belakang yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini membawa, peneliti untuk mengajukan judul penelitian “Pengaruh Koneksi Politik, Ukuran, *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2013 dan 2015-2017 (Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo)”

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini membahas terkait pengaruh koneksi politik, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap nilai perusahaan pada dua era pemerintahan, yaitu Era

Kepemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Adanya perbedaan terkait pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan pada kedua era pemerintahan akan di kaji dalam penelitian ini.

Beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji pengaruh koneksi politik, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tri Wulandari (2013), Ciao Jiang (2015), Selly Anggraeni (2017) menunjukkan bahwa koneksi politik pengaruh signifikan pada titik tertentu. Selain itu, penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan menurut hasil penelitian Ayu Sri dan Ary (2013) menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dan Bhekti (2010) menunjukkan hasil yang signifikan terkait ukuran perusahaan dan tidak signifikan terkait *leverage* terhadap nilai perusahaan.

Penelitian terkait perbedaan pengaruh koneksi politik dalam dua kondisi politik yang berbeda, khususnya pada era kepemimpinan telah dilakukan di beberapa negara seperti China, India, dan Sri Lanka. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fangjun Wang, dkk (2018), Debabrata dan Santanu (2014), menunjukkan bahwa terjadi perubahan nilai perusahaan ketika ada guncangan politik baik kebijakan pemerintah maupun pemilihan perdana menteri. Namun berbeda dengan hasil penelitian Henk dan Vidura (2016) yang menunjukkan bahwa ketika ada guncangan politik, tidak terjadi perubahan yang signifikan pada nilai perusahaan.

Hasil penelitian-penelitian tersebut menjadi salah satu dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan topik ini. Peneliti menggunakan latar belakang waktu era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo untuk mengetahui tentang pengaruh koneksi politik, ukuran perusahaan dan *leverage* pada kedua era tersebut serta mengetahui perbedaan pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan pada masa pemerintahan keduanya.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Latar belakang yang menjadi rumusan ide penelitian ini membawa peneliti untuk merumuskan tujuan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh antara koneksi politik, *size*, dan *leverage* terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh koneksi politik, *size*, dan *leverage* terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

#### **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Penelitian kali mendapat acuan dari penelitian sebelumnya yang menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui tingkat signifikan terkait pengaruh koneksi politik, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap nilai perusahaan pada kedua era presiden serta mencari adanya perbedaan diantara keduanya. Metode penelitian akan dibahas lebih lanjut pada bab 3 penelitian ini.

#### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini mengungkapkan terkait adanya pengaruh yang signifikan koneksi politik, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap nilai perusahaan dan perbedaan pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan pada ke dua era tersebut. Variabel koneksi politik pada kedua periode pemerintahan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel ukuran perusahaan dan *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada dua periode tersebut. Selain itu, tidak ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya. Pembahasan terkait hasil penelitian akan diungkap secara lengkap pada bab 4.

#### **1.6 Kontribusi Riset**

Penelitian ini mengemukakan pengaruh koneksi politik, ukuran, dan *leverage* terhadap nilai perusahaan pada 2 era kepemimpinan presiden. Pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan pada 2 era kepemimpinan presiden tersebut akan dikaji terkait adanya perbedaan diantara keduanya. Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan terkait pengaruh variabel independen terhadap dependen bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut.



### 1.7 Uji Ketahanan (*Robustness*)

Penulis dalam penelitian ini melakukan uji asumsi klasik dan uji regresi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Uji asumsi klasik terdiri atas uji ketahanan yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan uji *fixed effect model* yang ditentukan berdasarkan hasil dari uji Hausman. Setelah melakukan uji hausman, penulis melakukan uji multikolinearitas dengan melakukan uji VIF. Pada tahap selanjutnya, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat adanya masalah heteroskedastisitas. Pada tahap akhir, penulis melakukan uji autokorelasi untuk mengetahui adanya masalah autokorelasi. Uji Robust dilakukan untuk menyelesaikan adanya masalah heteroskedastisitas. Setelah melakukan uji asumsi klasik, penulis melakukan uji regresi dan uji independen *t test* untuk menjawab rumusan masalah. Uji regresi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan uji independen *t test* dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan diantara kedua data yang telah dikelompokkan.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis supaya penelitian ini dapat lebih mudah untuk dimengerti oleh pembaca, antara lain :

#### Bab 1 Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki lingkungan politik yang dinamis. Setelah turunnya pemerintahan orde baru, Indonesia setiap beberapa tahun sekali mengalami pergantian presiden beserta kabinet kerjanya. Bagi perusahaan, dinamika politik merupakan persoalan yang perlu diperhatikan, karena pemerintah memiliki otoritas terkait regulasi dan kebijakan. Penelitian ini membahas terkait pengaruh koneksi politik, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap nilai perusahaan pada dua periode pemerintahan, yaitu Periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Terkait fenomena dinamika politik yang terjadi di Indonesia penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan

signifikan terkait pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan pada kedua era tersebut.

## Bab 2 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan 3 dasar teori, yaitu teori *Rent-Seeking*, *Agency Theory*, dan *Trade-off*. Teori-teori tersebut digunakan oleh penulis sebagai dasar pemikiran karena memiliki suatu kesamaan, yaitu bagaimana pihak manajemen melakukan koneksi politik untuk mencapai tujuan sesuai dengan motif yang telah ditentukan. *Political connection* dapat terjadi apabila salah orang yang memiliki kewenangan tinggi dalam perusahaan tersebut merangkap jabatan sebagai seorang pejabat politik atau seorang politikus yang menonjol (Raharja, 2013). Penelitian dengan topik pengaruh koneksi politik, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap nilai perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti di berbagai negara di seluruh dunia. Penelitian tersebut menghasilkan hasil dan kesimpulan yang bervariasi dengan masing-masing faktor yang digunakan. Rangkuman umum mengenai penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dapat diamati pada lampiran 1 pada penelitian ini.

## Bab 3 Metodologi Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dipilih dengan dasar permasalahan tersebut. Koneksi politik, *size*, dan *leverage* dipilih sebagai variabel independen, sedangkan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai data penelitian. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang dihimpun dari Laporan Tahunan Perusahaan yang telah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah populasi dari Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2017. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan, uji asumsi klasik, dan analisis regresi yang dibantu dengan perangkat lunak program STATA. Untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan

pada kedua periode pemerintahan tersebut, penulis melakukan uji *independent t test* dengan menggunakan perangkat lunak yang sama, yaitu STATA.

#### Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Semua perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2017 digunakan sebagai sampel pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan model regresi sederhana sehingga ada beberapa prosedur uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dan berpengaruh terhadap hasil regresi. Hasil penelitian ini, secara garis besar menyatakan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada kedua era pemerintahan. Sedangkan *size* dan *leverage* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada kedua era tersebut. Hasil uji independen *t test* terkait uji perbedaan pada masing-masing era pemerintahan yang berpengaruh tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan diantara kedua era pemerintahan tersebut.

#### Bab 5 Kesimpulan

Koneksi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada kedua era pemerintahan presiden dan tidak ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya. Namun, *leverage* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan pada kedua era tersebut. Keberadaan orang yang terkoneksi politik di dalam perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dapat dilatarbelakangi karena orang yang terkoneksi politik tidak memanfaatkan posisinya untuk perusahaan. Kebijakan pemerintah terkait penanganan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) juga dapat menjadi motif orang yang terkoneksi tidak mengambil langkah yang berpengaruh terhadap perusahaan.